

ABSTRACT

Informal sector continues to be an important component of economic development in Indonesia. More than a half of people in the workforce identified as informal sector workers. Even though their contribution for the Indonesian economy is significant, however, government of Indonesia do not give serious attention for their social security until 2004. Since the enacted of Law No. 40/2004 on the national security system targeting universal social protection coverage, government through BPJS Ketenagakerjaan as an institution that run social security for employment, has trying to attract informal workers to join BPJS Ketenagakerjaan programs for their social security protection by giving them financial incentive for membership. However, the financial incentive that has been given failed to attract the membership. The number of informal workers who covered by BPJS Ketenagakerjaan still very low. This current study analyses the reason why informal workers reluctant to join BPJS Ketenagakerjaan programs even though they have been penetrated with the financial incentive. Using a case study of grebek pasar campaign, this study revealed that the reasons why informal workers reluctant to join BPJS Ketenagakerjaan programs is because the financial incentive fails to change their beliefs about national social security system. The role of information in the grebek pasar campaign also fail to change the informal workers' interest and to create new opportunity set to their choice. The case study then is discussed in reference to lesson learn from practices in other countries.

Keywords: Informal workers, Social Security, Indonesia, Situational Analysis, Employment

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri, informal sector merupakan komponen penting dalam ekonomi Indonesia. Lebih dari setengah pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Walaupun kontribusi pekerja informal cukup besar untuk perekonomian Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia tidak serius memperhatikan jaminan sosial mereka. Tidak sampai tahun 2004, di tahun ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang undang No. 40 tahun 2004 mengenai system jaminan sosial nasional. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan institusi bertanggung jawab mengenai perlindungan pekerja informal, pemerintah telah berusaha memasarkan program jaminan sosial untuk pekerja informal. Selama beberapa tahun kebelakang, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berusaha merancang berbagai macam cara untuk memasarkan program perlindungan tenaga kerja informal salah satunya dengan memberikan stimulus iuran kepada pekerja informal yang mau mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Namun, stimulus iuran yang diberikan gagal untuk menarik kepesertaan pekerja informal. Penelitian ini menganalisis alasan dibalik gagalnya stimulus iuran yang diberikan kepada pekerja informal. Menggunakan program grebek pasar sebagai bahan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa gagalnya stimulus iuran karena stimulus iuran gagal untuk merubah keyakinan pekerja informal mengenai jaminan sosial nasional. Fungsi informasi di dalam program grebek pasar juga gagal menarik perhatian dari pekerja informal. Penelitian ini memasukan beberapa rekomendasi prkatikal yang dapat digunakan untuk usaha merubah persepsi tersebut menggunakan preferensi internasional model dari negara-negara yang memiliki karakteristik sama.

Kata Kunci: Pekerja Informal, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Indonesia, Situasional Analisis